



LAPORAN CASCADING KINERJA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN

PURWAKARTA TAHUN 2017



INSPEKTORAT KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Veteran No.147 Purwakarta 41115

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Cascading Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Cascading Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka mengimplementasikan system akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Akhir kata, semoga Laporan Cascading Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan dan pelayanan prima pendidikan terhadap masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Ir.Tarsamana Setiawan

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	2
BAB. I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Gambaran Kondisi Pendidikan	3
1.3 Struktur Organisasi	4
1.4 Ruang Lingkup	6
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.2 Visi dan Misi	7
2.3 Tujuan	9
2.4 Sasaran	9
2.5 Strategi dan Arah Kebijakan Umum	10
2.6 Cascading Kinerja	11
BAB. III PENUTUP	13
LAMPIRAN	

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematik. Penanganan tindak korupsi secara sistematik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan adanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berkinerja tinggi.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk Rencana Strategis Lima Tahunan serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahunnya. Untuk mendukung laporan tersebut maka perlu adanya penetapan target kinerja sesuai tugas dan fungsi dari jabatan yang dipegang bagi pejabat eselon dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang mencerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Laporan Cascading Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini merupakan langkah pemerintah untuk menuju pembentukan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2 Gambaran Umum

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

1.3 Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Peangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta terdiri dari: (1) Unsur Pimpinan, yaitu Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda (2) Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur; Sekretariat terdiri dari: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Subbag Evaluasi dan Pelaporan, (3) Inspektur Pembantu I, II, III dan IV serta Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah Kabupaten Purwakarta. Secara rinci struktur organisasi Inspektur Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut :

1. Unsur pimpinan yaitu Inspektur
2. Sekretaris yang membawahi 3 Subbag:
 - a) Kepala Sub.Bagian Kepegawaian dan Umum
 - b) Kepala Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c) Kepala Sub.Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Terlampir

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Laporan Cascading Kinerja Inspektorad Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 adalah:

1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dilingkungan Inspektorad Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengawasan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 dan Renstra Inspektorad Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018

Adapun sistematika penulisan Laporan Cascading Kinerja Inspektorad Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 terdiri dari :

- BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, gambaran umum, struktur organisasi dan ruang lingkup
- BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, memuat informasi tentang rencana strategis, visi dan misi Inspektorad Daerah Kabupaten Purwakarta, strategi dan arah kebijakan umum, dan perjanjian kinerja (Cascading Kinerja)
- BAB III Penutup

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Badung. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013–2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013–2018, merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan yang merupakan penjabaran visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2. Visi dan Misi

2.2.1 Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah. Berdasarkan kondisi Kabupaten Purwakarta pada saat ini, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki serta berpedoman pada Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 yaitu:

Visi Kabupaten Purwakarta

“PURWAKARTA BERKARAKTER”.

Misi Kabupaten Purwakarta

1. Mengembangkan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal Yang Bernilai Religiusitas, Berorientasi Pada Keunggulan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pemerataan Ekonomi Yang Berkeadilan Bagi Seluruh Masyarakat
2. Pengembangan Struktur Wilayah dan Tata Ruang Yang Berorientasi Pada Keutuhan Lingkungan Baik Hulu Maupun Hilir Serta Unsur Tanah, Air Udara dan Matahari
3. Mengembangkan Struktur Pemerintahan Yang Berorientasi Kepuasan Pelayanan Publik Berbasis Perdesaan Yang Berorientasi Kemakmuran Rakyat

2.2.2 Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sangat strategis, sebagai membina dan mengawasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, serta Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk mendorong tercapainya misi ketiga Kabupaten Purwakarta.. Dalam rangka mencapai misi tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung merumuskan visi dan misinya sebagai berikut:

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

“Inspektorat Ujung Tombak Lembaga Yang Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa”.

Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Inspektorat Kabupaten Purwakarta.
- 2) Meningkatkan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Purwakarta dan Aparat Pengawas Fungsional lainnya.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

Untuk mewujudkan Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2013-2013 yang telah menetapkan 8(delapan) sasaran strategik dalam Tahun 2017 yang memiliki tujuan dan sasaran mensukseskan 3 (tiga) Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Pengukuran kinerja yang dilakukan pada masing-masing kegiatan didasarkan pada nilai indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diperoleh.

2.2.3 Tujuan dan Sasaran

2.2.3.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas dan profesionalisme aparatur Inspektorat Kabupaten Purwakarta, baik sebagai tenaga teknis pemeriksa (Pengawas Pemerintahan/ Auditor) maupun tenaga administratif
- 2) Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dalam upaya meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Purwakarta sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- 3) Terwujudnya tertib administrasi pada obyek pemeriksaan atau unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purwakarta secara bertahap dapat menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tegas, jelas, terukur dan legal sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berhasil guna, berdaya guna, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.2.3.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi
- 2) Menurunnya jumlah SKPD dengan temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi
- 3) Meningkatnya SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang
- 4) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Purwakarta
- 5) Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
- 6) Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan
- 7) Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- 8) Meningkatnya sarana dan prasarana yang lengkap

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah
Kabupaten Purwakarta

Visi: PURWAKARTA BERKARAKTER	
Misi ke-tiga: Mengembangkan Struktur Pemerintahan Yang Berorientasi Kepuasan Pelayanan Publik	
Tujuan:	Sasaran:
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan pembangunan.

Tabel 2.2
Keterkaitan Visi, Tujuan dan Sasaran
Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Visi : Inspektorat ujung tombak lembaga yang mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa	
Tujuan:	Sasaran:
1. Menjadikan pengawasan internal sebagai katalis dan peran konsultatif	Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan
2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Menurunnya jumlah SKPD dengan temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi,
	Meningkatnya SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level
3. Mewujudkan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Purwakarta
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
	Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang- undangan
4. Mewujudkan pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
5. Mewujudkan sarana dan prasarana yang lengkap	Meningkatnya sarana dan prasarana yang lengkap

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Kebijakan pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2018 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan sasaran dan target dan arah strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, serta mengacu pada renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2018. Kebijakan Inspektorat Daerah ini, juga memperhatikan komitmen pemerintah Kabupaten

Purwakarta yang mengacu pada Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014.

Kebijakan merupakan upaya sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pencapaian target-target strategis berdasarkan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Tiap kebijakan menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan pengawasan disediakan untuk mencapai targettarget strategis.

Arah kebijakan untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan arah kebijakan pada Kabupaten Purwakarta periode 2013-2018 yang disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya arah kebijakan umum ini menjadi pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan kegiatan.

Untuk lebih jelasnya strategi dan arah kebijakan umum Kabupaten Purwakarta periode 2013-2018 dapat dilihat pada table 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Purwakarta

Visi: Purwakarta Berkarakter			
Misi III: Mengembangkan Struktur Pemerintahan Yang Berorientasi Kepuasan Pelayanan Publik Berbasis Perdesaan Yang Berorientasi Kemakmuran Rakyat			
Tujuan:	Sasaran:	Strategi:	Arah Kebijakan:
1. Pengembangan Tataan Birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.	2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	2. Meningkatkan system pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas system pengawasan

2.4. Cascading Kinerja

Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai tahun 2017 berdasarkan tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu Membantu Bupati membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas pembantuan oleh Perangkat daerah.

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan bidang pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan analisis SWOT, sasaran strategis dan kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2018 seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang selanjutnya dijadikan dasar penentuan program-program sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan.
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.
- 4) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- 5) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta di dalam melaksanakan program dan kegiatan, secara rinci dapat dilihat Perjanjian Kinerja (Cascading Kinerja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 dapat sebagaimana dalam lampiran.

BAB IV. PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Cascading Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah bagi pejabat eselon yang ada dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Demikianlah Laporan Cascading Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini dibuat, semoga ada manfaatnya, dan semua masukan, kritik serta saran yang disampaikan akan kami terima untuk kesempurnaan laporan ini ke depan.

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Ir. Tarsamana Setiawan
NIP. 19580204 198603 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA | INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Susilawati,S.Sos.,MM
NIP : 19620419 199012 2 001
Jabatan : Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir.Tarsamana Setiawan
NIP : 19580204 198603 1 015
Jabatan : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Inspektur Inspektorat Daerah

Purwakarta, 3 Januari 2017

Pihak Pertama
Sekretaris

Ir.Tarsamana Setiawan
NIP. 19580204 198603 01

Hj. Susilawati,S.Sos.,MM
19620419 199012 2 001

PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017

No.	Indikator Kinerja	Targe	Keterangan	
(1)	(2) Sasa	(3)	(4) t	
(1)	(2) Sasa	(3)	(4) t	
1	Meningkatnya pelayanan administrasi umum	Persentase waktu pelayanan surat masuk yang dapat diproses sesuai dengan tujuan berdasarkan SOP	100,00 %	Non IKU
2	Berfungsinya barang milik daerah dengan baik	Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik	100,00 %	Non IKU
3	Meningkatnya implemenakuntabilitas kinerja i SKPD	1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 2 Persentase dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu 3 Persentase laporan yang dikirim tepat waktu	75,00 100,00 % 100,00 %	Non IKU Non IKU Non IKU
4	Terciptanya tata kelola keuangan	1 Persentase SPJ yang masuk dan dapat diproses pembayarannya 2 Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas 3 Persentase temuan hasil pemeriksaan internal / eksternal yang ditindaklanjuti	100,00 % 100,00 % 100,00 %	Non IKU Non IKU Non IKU
5	Meningkatnya pelayanan administrasi	1 Persentase usulan kenaikan pangkat yang diproses tepat waktu 2 Persentase usulan pensiun yang diproses tepat waktu 3 Persentase usulan kenaikan gaji berkala yang diproses tepat waktu	100,00 % 100,00 % 100,00 %	Non IKU Non IKU Non IKU
6	Meningkatnya disiplin pegawai	Persentase kehadiran pegawai pada apel pagi tepat waktu	100,00 %	Non IKU

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 778.630.000 APBD	
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 65.000.000 APBD	
3. Program peningkatan disiplin aparatur	Rp. 70.000.000 APBD	

- | | | | |
|----|---|-----|--------------------------------|
| 4. | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan APBD | Rp. | 325.000.000 |
| 5. | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Bantuan pelaksanaan kebijakan KDH | Rp. | 2.550.000.000 APBDProvinsi dan |
| 6. | Program peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Rp. | 40.000.000 APBD |
| 7. | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Rp. | 0 APBD |

Jumlah Rp. 3.723.630.000

PihakKedua

InspekturInspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta

Ir.Tarsamana Setiawan

NIP. 19580204 198603 1 015

Purwakarta, 3 Januari 2017

Pihak Pertama

Sekretaris

Hj. Susilawati,S.Sos.,MM

NIP.19620419 199012 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA | N S P E K T O R A T D A E R A H

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115

Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel se berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	NIP	Jabatan
H. Budi Santoso,SH.,M.Si	19620228 199003 1 005	IRBAN I
Drs. Taufik Rahman,M.Si	19671214 199203 1 006	IRBAN II
Nuryatna,SE.,M.Si	19640214 198903 1 007	IRBAN III
Drs. Teddy Iskandar,M.Si	19720220 199603 1 003	IRBAN IV

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir.Tarsamana Setiawan
NIP : 19580204 198603 1 015
Jabatan : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampir: perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang tel: ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kiner tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhad: capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Inspektur Inspektorat Daerah

Ir.Tarsamana Setiawan
NIP. 19580204 198603 015
Purwakarta, 3 Januari 2017

Pihak Pertama

Inspektur Pembantu

1. **H. Budi Santoso,SH.,M.Si**

.....

NIP.19620228 199003 1 005

2. **Drs. Taufik Rahman,M.Si**

.....

NIP. 19671214 199203 1 006

3. Nuryatna,SE.,M.Si

.....

NIP.19640214 198903 1 007

4. Drs. Teddy Iskandar,M.Si

.....

NIP.19720220 199603 1 003

PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menurunnya jumlah SKPD dengan temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi	Persentase SKPD yang mendapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang material	2%	Target tahunan Renstra
2	Meningkatnya SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level	Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level berkembang	80%	Target tahunan Renstra
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Purwakarta	Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B	B	Target tahunan Renstra
4	Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang- undangan	Persentase berkurangnya rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang harus ditindaklanjuti	66%	Target tahunan Renstra
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan yang diterima Inspektorat setiap tahun	100%	Target tahunan Renstra
6	Peningkatan Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan keuangan OPD	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 buah laporan	Tapkin
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Reviu LKPD	1 buah laporan	Tapkin

	Meningkatnya Kualitas perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan PKPT dan Non PKPT	100%	Tapkin
		Persentase Pelaksanaan Reviu RKA	100%	Tapkin
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%	Tapkin
		Persentase Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah	100%	Tapkin
		Persentase Pelaksanaan Evaluasi Berkala Temuan Hasil pengawasan	100%	Tapkin
		Persentase Pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Belanja Hibah dan Bansos PABD	100%	Tapkin
		Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa	100%	Tapkin

Catatan : Dukungan anggaran untuk pelaksanaan program dan kinerja diatas dikelola oleh

Subag Perencanaan dan Keuangan

NIP.19620228 199003 1 005

2. **Drs. Taufik Rahman,M.Si**
NIP. 19671214 199203 1 006

Pihak Kedua,
Inspektur Inspektorat Daerah

3. **Nuryatna,SE.,M.Si**
NIP.19640214 198903 1 007

Ir.Tarsamana Setiawan
NIP. 19580204 198603 1 015

4. **Drs. Teddy Iskandar,M.Si**
NIP.19720220 199603 1 003

Purwakarta,
3 Januari
2017 Pihak
Pertama
Inspektur
Pembantu :

1. **H. Budi Santoso,SH.,M.Si**

.....

AMEL

Hj. Susilawati,S.Sos.,MM

NIP.19620419 199012 2 001 Purwakarta, 3



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA | N S P E K T O R A T D A E R A H

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115

Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj.Sri Aisah
NIP : 19650305 199303 2 004
Jabatan : Kepala Sub.Bagian Kepegawaian dan Umum pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. Susilawati,S.Sos.,MM
NIP : 19620419 199012 2 001
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta selaku atasan

pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan Januari 2017
sanksi. Pihak Pertama
Kasubag. Kepegawaian dan Umum

Pihak Kedua,
Sekretaris

Hj.Sri Aisah

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB.BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	Strategis(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan administrasi umum	Persentase waktu pelayanan surat masuk yang dapat diproses sesuai dengan tujuan berdasarkan SOP	100,00 %	Non IKU
		Ketepatan pengelolaan absensi pegawai dan pengajuan TKD	100,00 %	Non IKU
2	Terlaksananya tata kelola Rumah Tangga Inspektorat secara efektif dan efisien	Tersedianya kebutuhan ATK, Cetakan, Perlengkapan kantor	100,00 %	Non IKU
		Tersedianya Kebutuhan sarana prasarana dan pemeliharaan gedung kantor dan alat kebersihan	100,00 %	Non IKU
		Terpeliharanya kendaraan dinas	100,00 %	Non IKU
		Pengisian KIB A,B,C,D,E,F dan KIR	100,00 %	Non IKU
3	Terlaksananya tata kelola Kepegawaian Inspektorat secara efektif dan efisien	Ketepatan Pengajuan Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional, DUK, Kenaikan Pangkat (KP), Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dll	100,00 %	Non IKU
4.	Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang mendapatkan Sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang mendapatkan Sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	80%	IKU

Catatan : Dukungan anggaran untuk pelaksanaan program dan kinerja diatas dikelola oleh NIP.19650305 199303 2 004 Subag Hj. Susilawati,S.Sos.,MM Perencanaan dan Keuangan NIP.19620419 199012 2 001 Purwakarta, 3 Januari 2017

Pihak Kedua,
 Sekretaris

Pihak Pertama
 Kasubag. Kepegawaian dan Umum

Hj.Sri Aisah



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kiki Yulianti,Se.,MM
NIP : 19860620 201001 2 022
Jabatan : Kasubag. Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. Susilawati,S.Sos.,MM
NIP : 19620419 199012 2 001
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta selaku atasan

pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris

Hj. Susilawati,S.Sos.,MM
NIP.19620419 199012 2 001

Purwakarta, 3 Januari 2017
Pihak Pertama
Kasubag. Perencanaan dan
Keuangan

Kiki Yulianti,Se.,MM

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB.BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)Strategis	(3)	(4)	(5)
1	Terciptanya tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	1 Persentase SPJ yang masuk dan dapat diproses pembayarannya 2 Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu 3 Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas 4 Jumlah temuan hasil pemeriksaan internal /eksternal yang ditindaklanjuti	100,00 % 14 Laporan 100,00 % 0,00 %	Non IKU Non IKU Non IKU Non IKU
2	Terlaksananya tata kelola perencanaan, yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja) 2. Jumlah dokumen Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 3. Jumlah dokumen Perencanaan Program dan Penganggaran (DPA,RKA, AKB) 4. Jumlah Dokumen Pelaporan Instansi Pemerintahan (LAKIP, Data LKPJ, Data LPPD)	4 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen	Non IKU Non IKU Non IKU Non IKU
3	Terlaksananya tata kelola Barang Milik Daerah, yang efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah Laporan Barang Milik Negara	1 Dokumen	Non IKU

Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 778.630.000	APBD
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 65.000.000	APBD
3. Program peningkatan disiplin aparatur	Rp. 70.000.000	APBD
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan keuangan	Rp. 325.000.000	APBD capaian kinerja
5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp. 2.550.000.000	APBD Bantuan Provinsi dan
6. Program peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	40.000.000	APBD Rp.
7. Program Penataan dan Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyempurnaan Kebijakan	0	APBD Rp.

Jumlah Rp. 3.723.630.000

Pihak Kedua,
Sekretaris

Purwakarta, 3 Januari 2017
Pihak Pertama
Kasubag. Perencanaan dan Keuangan

Hj. Susilawati,S.Sos.,MM
NIP.19620419 199012 2 001

Kiki Yulianti,SE.,MM
NIP. 19860620 201001 2 022



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA | N S P E K T O R A T D A E R A H

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115

~~Telp. (0264) 200115 Email: inspektorat@purwakartakab.go.id~~

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Sumiatna.S.AP
NIP : 196203141989031010
Jabatan : Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. Susilawati,S.Sos.,MM
NIP : 19620419 199012 2 001 Jabatan : Sekretaris Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta selaku atasan pihak pertama, selanjutnya
disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris

Hj. Susilawati,S.Sos.,MM

Pihak Kedua,

NIP.19620419 199012 2 001
Purwakarta, 3 Januari 2017
Pihak Pertama
Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan

Asep Sumiatna.S.AP
NIP.196203141989031010

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB.BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya tata kelola pelaporan dan evaluasi kegiatan yang efektif dan efisien	1.Jumlah Ikhtisar Laporan Hasil pemeriksaan 1. Pendokumentasian Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat daerah sesuai PKPT dan Non PKPT, Berkala dan Khusus, Inspektorat Provinsi, BPK RI BPKP dan Irjen kementerian. 2. Inputing hasil temuan pemeriksaan ke dalam aplikasi resmi BPKP 3. Inputing laporan Teptra 4. Evaluasi terhadap tindak lanjut temuan OPD	1 dokumen 100% 100% 100% 100%	Non IKU Non IKU Non IKU Non IKU Non IKU

Catatan : Dukungan anggaran untuk pelaksanaan program dan kinerja diatas dikelola oleh Subag Perencanaan dan Keuangan

Pihak Kedua,
Sekretaris

Hj. Susilawati,S.Sos.,MM
NIP.19620419 199012 2 001

Purwakarta, 3 Januari 2017
Pihak Pertama
Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan

Asep Sumiatna.S.AP
NIP.196203141989031010



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA | INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115

Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : 1. Ahmad Sukarlan,SH NIP. 19691102 198303 1 011
2. Drs. Deni Bustomi NIP. 19600711 198603 1 016 3.
Dra. Hj.Hartika NIP. 19690209 199303 2 003
4. Pipin Iskandarsyah,ST.,M.Si` NIP. 19830228 200604 1 002 Jabatan :

Pengendali Teknis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir.Tarsamana Setiawan
NIP : 19580204 198603 1 015

Jabatan : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta selaku

atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

	Purwakarta, 3 Januari 2017
Pihak Kedua,	Pihak Pertama
Inspektur Inspektorat Daerah	Pengendali Teknis :
	1. Ahmad Sukarlan,SH
<u>Ir.Tarsamana Setiawan</u>	2. Drs. Deni Bustomi
NIP. 19580204 198603 1 015	3. Dra. Hj.Hartika
	4. Pipin Iskandarsyah,ST.,M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA | INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115

Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Terlampir Jabatan : Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir.Tarsamana Setiawan
NIP : 19580204 198603 1 015
Jabatan : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta selaku

atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Inspektur Inspektorat Daerah

Purwakarta, 3 Januari 2017
Pihak Pertama
Auditor

Ir.Tarsamana Setiawan
NIP. 19580204 198603 1 015

Tandatangan Terlampir

DAFTAR PIHAK KESATU (AUDITOR)

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dede Sunarya,S.AP	196302051989031010	Auditor Muda	
2	E.Enriko Y. S.AP	197701171998032002	Auditor Muda	
3	Hanapi, S.ST	196910011995031005	Auditor Muda	
4	Agustinus Napitupulu,SE	197303172006041003	Auditor Muda	
5	Asep Adam.SE.,M.Ak	197907072005011011	Auditor Muda	
6	Muhammad Nasih,SE	198501162009021004	Auditor Muda	
7	Indah Susanti, SH	198006182007012006	Auditor Muda	
8	Hamdan,SE	197509112006041003	Auditor Muda	
9	Yanto Hardianto,SE	197911192009011002	Auditor Muda	
10	Dadang Setiawan,ST	197912022006041005	Auditor Pratama	
11	Farid Priyadharsani K,ST	198002032009011003	Auditor Pratama	
12	Rudi Sutiawan,SE	197102172009011001	Auditor Pratama	
13	R.Elsa Layla P,SE	198510152009012001	Auditor Pratama	
14	Siti Dewi Mulyati,SE	198112162009012001	Auditor Pratama	
15	H.Nono Farino,S.Kom	197402032009021001	Auditor Pratama	
16	Fita Lindawaty,SE	197809272010012001	Auditor Pratama	
17	Asep Sophiyana,SE	197401252007011005	Auditor Pratama	
18	Nani Rohaeni	196509021989032005	Auditor Penyelia	
19	Yayan Heryana,Bc.Ak	196912211996031003	Auditor Penyelia	
20	Rahmat Sopyan,A.Md	197409261998031002	Auditor Penyelia	

